



**SIKAP DAN TINDAKAN ORANG KRISTEN TERHADAP
ANCAMAN POLITIK IDENTITAS DAN INTOLERANSI:
SEBUAH KAJIAN TEOLOGI PRAKTIS**

Yonatan Alex Arifianto^{1*)}, Suhadi Suhadi², Samuel Purdaryanto³

¹ Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga

² Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup

³ Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu

*) Email Correspondence: arifianto.alex@sttsangkakala.ac.id

Abstract: Unfortunately, the big national problem through disputes that lead to the horizontal disintegration of the nation occurs in Indonesia. However, this happened because people wanted to be pitted against power-greedy individuals by sacrificing harmony to reduce diversity and pluralism. Using descriptive qualitative methods in this research, it can be concluded that the responsibility of believers or the church, in general, is within the phenomenology of identity politics. Believers can create harmony and strengthen it through attitudes in public spaces. This aligns with the ideals of Indonesian independence, which does not see the SARA background. Likewise, pluralism must be maintained and guarded by actions that do not offend excessive sentiments of human identity. Therefore mutual respect and respect are separate ways to strengthen harmony so that the Indonesian nation is comfortable and becomes a place of peace for the next generation.

Keywords: Identity Politics, Tolerance, Pluralism, Harmony, Disintegration of the nation

Abstraksi: Persoalan bangsa yang besar lewat perselisihan yang menimbulkan disintegrasi bangsa secara horizontal sangat disayangkan terjadi di Indonesia. Namun hal itu terjadi karena masyarakat mau di adu domba dengan oknum serakah kekuasaan dengan mengorbankan kerukunan bertujuan mereduksi keberagaman dan kemajemukan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang percaya atau gereja secara umum yang berada dalam fenomenologi politik identitas. Orang percaya dapat menciptakan kerukunan dan memperkokoh melalui sikap di ruang publik. Hal itu selaras dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tidak melihat latar belakang SARA. Begitu juga kemajemukan harus tetap dijaga dan dikawal dengan tindakan yang tidak menyinggung sentimen berlebihan dari identitas manusia. Oleh karena itu saling menghargai dan menghormati menjadi cara tersendiri untuk memperkokoh kerukunan supaya bangsa Indonesia ini nyaman dan menjadi tempat kedamaian bagi generasi selanjutnya.

Kata kunci: Politik Identitas, Toleransi, Kemajemukan, Kerukunan, Disintegrasi bangsa

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang merdeka dari penjajahan, dan yang berdikari kuat serta mampu bertahan sampai didetik ini merupakan bangsa yang penuh adab dan nilai gotong royong, dan toleransi yang kuat. Sebab negara Indoensia berlandasan nilai berbangsa yang sudah disepakati lewat filosofi Pancasila. Filosofi tersebut menaungi keberagaman serta banyaknya perbedaan disegala aspek anak bangsa. Oleh karena itu keberadaan filosofi tersebut adalah modal besar untuk menjaga keutuhan bangsa, dan juga merupakan tekad yang besar untuk berdiri bagi bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan serta membela keutuhan negara Kesatuan Replublik Indonesia dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan. Begitu juga Indonesia mendapatkan predikat negara yang majemuk dengan keramahan dan *tepo slira* dalam bermasyarakat, hal itu ditandai dengan sikap dan tindakan yang mengarah kepada nilai persaudaraan, toleran dan hidup dalam damai antar pemeluk beragama dalam multikultural dan pluralitas. Walaupun sering terdengar adanya indikator dari suara sumbang dan riak-riak pertikaian dalam konflik beragama seperti yang terjadi beberapa tahun silam di kota Ambon konflik horizontal antar agama. namun sejauh ini dapat diminimalisir atas dasar kesepahaman nilai moralitas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah mengakar kuat dalam pribadi masyarakat bangsa. Namun saat ini dalam pemberitaan nasional dan berbagai media sosial yang seringkali di *blow up* adalah tindakan dengan konflik dan kepentingan golongan mengatasnamakan agama yang mana hal itu berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. Bahkan juga sering terjadi konflik yang melebar dan merugikan banyak korban antara kelompok-kelompok yang akibatnya menciderai rasa persatuan sesama anak bangsa. Adanya perselisihan yang seringkali mengkaitkan isu golongan dalam hal ini

sering dikaitkan dengan organisasi masyarakat, dan dilatarbelakangi adanya perbedaan suku, agama, ras dan jenis kelamin dari pasangan calon kepala daerah yang tidak bisa diterima.¹ Maka sebagai anak bangsa menyatakan dengan tegas bahwa politik identitas yang dilatarbelakngi oleh apapun tidak bisa mengagalkan kemajemukan bangsa.

Walaupun fakta dilapangan adanya politik identitas dijadikan senjata bagi politikus ataupun orang yang mengatasnamakan ajaran dan adat yang mana aksinya bertujuan untuk pergantian kekuasaan pemerintahan. Dimana sarananya menggunakan pemilu yang dilakukan di Indonesia. Melalui mekanisme pemilihan secara langsung para politikus ini menyuarakan konten politik identitas menjadi target untuk mencari massa demi kepentingan pribadinya. Maka masyarakat yang rentan akan *hoax* dan lemahnya literasi berpolitik. Bahkan kebersamaan atau solidaritas yang tinggi terhadap menjadikan politik identitas sebagai momentum yang pas dari salah satu alat dan sarana politiknya untuk memikat demi mendulang suara. Politik identitas sering menggunakan isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah, bahkan ketertimpangan pembangunan dan termarjinalnya masyarakat sebagai “jualan” utama para politikus politik identitas.

Iming-iming dari konten politik identitas ini masuk dalam propaganda mereka yang mana ini adalah tujuan awal supaya mereka terpilih. Sebab politik identitas menjadi alat yang sangat kuat dalam wacana politik mereka, dan terlebih banyak masyarakat dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal maupun politisikus daerah yang tidak bisa menerima perbedaan untuk tampil sebagai pemimpin, hal ini memang merupakan masalah yang selalu muncul

¹ Dina Lestari, “Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas Di Indonesia,” *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16, <https://doi.org/10.36312/jupe.v4i4.677>.

disetiap pemilihan kepala Daerah. Sebab propaganda politik identitas memang diakui tidak selalu gampang untuk dijelaskan.

Selain propaganda adanya arogansi para politikus menyulut pertikaian dengan menyetujui setiap tindakannya sebagai bagian atas nama agama. Sehingga arogansi yang tidak melihat bingkai besar dari kesatuan pancasila, melahirkan disintegrasi sesama anak bangsa. Sebab faktanya ada konflik dalam dunia maya di platform media sosial ramai akan komentar yang bernada merendahkan manusia dan menghujat keyakinan.² Hal itu dipengaruhi dengan sikap arogansi dan keserakahan yang mencederai kerukunan. Fakta yang tidak bisa dipungkiri yang terjadi saat ini adalah, banyak aktor politikus lokal dan tokoh politik nasional menggunakan isu politik identitas ini secara intens berkelanjutan dan masif atau menyeluruh dalam pembagian kekuasaan.³

Kekuasaan untuk menguasai manusia dan segala yang terkait dengan jabatan menjadi tujuan utamanya. Hal itu menjadi sebuah kecenderungan yang dapat menimbulkan disintegrasi dan konflik bangsa sebab apapun yang dilakukan dalam memobilisasikan rasa identitas bahasa, suku ataupun agama maupun golongan merupakan tindakan pembajakan terhadap nilai dan sistem dari keberadaan yang sesungguhnya dari Indonesia sebagai suatu bangsa yang terkenal dengan kemajemukannya.⁴

Memang politik identitas dalam muatan kampanye sangat berperan penting. Hal itu dimana ada signifikansi

trand keberhasilan dari sarana politik identitas ini menunjukkan hasil signifikansi dalam mengakumulasi suara pemilih. Namun, di sisi lain sikap dan nilai dari politik identitas sarat dengan eksklusif sehingga merasa diri paling benar, merasa paling berpengaruh yang dimana rasa tersebut menjadi indikator perselisihan dan berujung menimbulkan perpecahan antar kelompok di tengah-tengah masyarakat, bahkan sistem dalam negara Indonesia yaitu demokrasi yang dikelola dengan tidak sehat. Standar pendidikan politik yang dinilai sangat buruk dan tidak mencerminkan kebersamaan maka pendidikan politik yang ditunjukkan bagi rakyat Indonesia tidak maksimal untuk membangun SDM dalam mengaktualisasikan perpolitikan yang semuanya itu mengarah kepada kehidupan berkeadilan.⁵ Tantangan lain yang cukup serius dihadapi bangsa ini terhadap keutuhan dan – multikultural datang dari berbagai gerakan sempalan yang mengatasnamakan agama dengan politik identitasnya masing-masing.⁶ Bahkan persoalan di Indonesia fenomenologi politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, sebagai pola utama membangun kekuatan politik selanjutnya peran keagamaan dimunculkan untuk menselaraskan iman. Lalu diutarakan nilai dari ideologi yang sama baik dari dasar adat istiadat maupun agama menjadi lokomotif meninggikan politik identitas. Terlebih adanya kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit politikus yang haus akan kekuasaan dengan artikulasinya dan ide masing-masing demi mengakumulasi suara untuk menang. Alasan dan dasar politik

² Zahrotunnimah Zahrotunnimah, "Pola Operasionalisasi Politik Identitas Di Indonesia," *Adalah* 2, no. 11 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i11.9438>.

³ Muhtar Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal," *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (2012): 109–26, <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>.

⁴ Franz Magnis Suseno, "Politik Identitas? Renungan Tentang Makna Kebangsaan," *Maarif* 13, no. 2 (2018): 7–13, <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.18>.

⁵ Fitria Wulan Dhani, "Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada," *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 1 (2019): 143–50, <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>.

⁶ Assyari Abdullah, "Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif," *An-Nida'* 41, no. 2 (2017): 202–12.

identitas yang dimainkan tersebut banyak dipengaruhi oleh ambisius dan kepentingan pribadi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, dan juga merupakan persoalan yang kompleks bagi komunikasi antar masyarakat, yang menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Akibat adanya agenda dan kepentingan pribadi maupun golongan yang diunggulkan dari pada rasa kebersamaan yang menghargai perbedaan.⁷

Politik identitas yang diaktualisasikan para politikus dengan memanfaatkan isu-isu SARA memang sangat berpotensi memantik konflik dan perpecahan serta disintegrasi bangsa yang masif. Hal ini dipicu oleh masih kuatnya sikap kepentingan pribadi dengan sentimen-sentimen kedaerahan, *primordialisme* serta rendahnya toleransi tentu hal itu merupakan masalah yang sangat serius yang harus segera diatasi untuk mencegah disintegrasi bangsa dan konflik horizontal dalam masyarakat majemuk.⁸ Bahkan politik identitas khususnya menggunakan narasi agama sebagai tujuan politik memang tidak pernah mati dalam arena politik di negeri ini. Seperti halnya momentum pemilihan kepala Daerah yang disertai terjadinya konflik disintegrasi sesama anak bangsa dan terpecahnya masyarakat membedakan SARA adalah fakta yang tidak bisa disangkal bagi politik identitas dimunculkan dalam perpolitikan tersebut. Terlebih ketika identitas agama, yang suci dalam membangun kemanusiaan dimunculkan untuk kepentingan golongan dalam kekuatan politik maka dampak dari keberagaman dan keutuhan berketuhanan yang Maha Esa akan tergores dari ulah segelintir orang.⁹

Politik identitas dan toleransi telah menjadi topik yang dibahas baik dari sisi hukum maupun agama serta kebangsaan dan menjadi pembahasan riset supaya menemukan akar masalah dan memberi solusi bagi masyarakat dalam menghadapinya. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh Obet Nego yang mengkaji tentang Teologi multikultural dan kemajemukan sebagai dasar makhluk sosial dalam meresponi politik identitas tersebut dan juga sebagai counter terhadap meningkatnya eskalasi politik identitas di negara Indonesia. Kesimpulan dari kajian tersebut adalah trend politik identitas di dalam praktiknya, sangat memperlambat ‘kelompok-kelompok’ partikular demi kepentingan para elite-elite politik yang tidak memiliki nilai menghargai kebersamaan dan bertanggungjawab demi keutuhan bangsa. Trend politik identitas tersebut kemudian direspon dengan teologi multikultural yang mana dinyatakan sebagai peran kebersamaan dan persatuan dari berbagai pluralitas untuk menghadirkan persatuan, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Politik identitas yang menjadi alat kendaraan dalam panggung politik untuk meraih simpati dan dukungan massa, selalu berakhir pada benturan-benturan di tengah-tengah masyarakat. Strategi dan cara berpolitik dengan intrik SARA tersebut dapat mengorbankan rakyat sendiri sehingga berakibat disintegrasi bangsa.¹⁰ Begitu juga dengan Sukron Romadhon dan Try Subakti melakukan penelitian yang sama, menyusun kajian tentang analisis terhadap politik identitas dan toleransi dengan judul toleransi dan politik identitas: Studi tentang perilaku politik kebangsaan di Indonesia. Dimana riset tersebut menyatakan bahwa dalam keberagaman dalam berbagai macam sektor, mendorong orang Indonesia

⁷ Abdullah.

⁸ Debora Sanur L, “Rekonsiliasi Politik Identitas di Indonesia,” *Majalah Info Singkat* (Jakarta, Mei 2017), 2

⁹ Endang Sari, “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta,” *Kritis* 2, no. 2 (2016): 145–56.

¹⁰ Obet Nego, “Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia,” *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 2 (November 5, 2020): 121–39, <https://doi.org/10.46494/psc.v16i2.109>.

khususnya orang percaya untuk mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Bangsa Indonesia dapat menjadi *role model* dalam menjalankan sistem pemerintahan yang memiliki latar belakang beragam dan dinamis. Sehingga gagasan tentang toleransi dan politik identitas menjadi langkah solutif dalam menyelesaikan dari berbagai macam konflik kelompok kepentingan.¹¹ Namun pada beberapa riset sebelumnya tersebut belum ada pembahasan tentang ancaman politik identitas dan hilangnya toleransi sebagai kajian memperkokoh kerukunan sesama anak bangsa. Oleh karenanya penelitian ini disusun untuk memberikan deskripsi cara praksis sikap dan tindakan orang percaya yang dapat memberikan dampak ekspresi iman Kristen dalam bermasyarakat dan juga ruang virtual demi menjaga keutuhan bangsa.

Kajian ini merespon pelbagai fenomena yang terjadi di bangsa ini dimana terkait dengan model politik identitas yang sering dimunculkan dan juga ditampilkan di Indonesia, yang berdampak terhadap sikap dan tindakan orang percaya merespon sebagai bentuk memperkokoh spritual dan nilai kerukunan termasuk di dalamnya bagaimana jalan keluar yang ditawarkan nilai dan moral Alkitab untuk mengatasi fenomena tersebut yang sangat meresahkan dan memicu konflik horizontal.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana seperti yang dinyatakan oleh Zaluchu bahwa penelitian deskriptif lebih terarah kepada kajian-kajian kebenaran yang memuat sifat relatif dan interpretatif. Metode ini juga lebih mengarah kepada analisis teori yang mendasar dan kuat untuk dimunculkan sebagai dasar

penulisan bertujuan pada hasil dari kesimpulan.¹² Oleh karenanya penelitian ini memilih metode kualitatif deskriptif. Kajian kualitatif ini mempergunakan data deskriptif yaitu hasil kajian dari studi pustaka terhadap pelbagai literatur yang relevan dan seiring dengan pembahasan dalam artikel ini.

Penelitian ini juga mengutamakan penggalian teks Alkitab yang dapat mendukung penulisan artikel ini. Pembahasan diawali dengan pemahaman tentang hakikat politik identitas dan ancamannya, dilanjutkan kepada nilai toleransi dalam nilai dan moral Alkitabiah. Sehingga atas dasar dan situasi fenomenologi politik identitas tersebut dilakukan analisis terhadap peran serta tindakan orang percaya merespon ancaman politik identitas sebagai aktualisasi yang dapat umat percaya lakukan dalam memperkokoh rasa persaudaraan yang bermuatan besar kerukunan baik di dunia nyata bermasyarakat maupun di ruang virtual saat ini. Sehingga dapat disimpulkan solusi praksis penerapannya sebagai bagian dari perintah Yesus yang menerapkan orang percaya sebagai terang dan garam dunia.

HASIL

Hasil penelitian ini memberikan temuan-temuan berkaitan dengan ancaman politik identitas dan hilangnya toleransi. Adapun hasil dari penelitian yang didapat melalui studi literatur. diharapkan memberikan kontribusi yang aktif dan berkelanjutan, khususnya berkenaan dengan sikap orang percaya sebagai pribadi yang terpanggil menjadi terang dan garam dunia untuk mempertahankan dan memperkokoh kerukunan dengan melawan setiap politik identitas yang mengataskan namakan SARA. Hasil penelitian dari artikel ini dapat

¹¹ Sukron Romadhon and Try Subakti, "Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 91–115.

¹² Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38, <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>.

memberikan dampak dan kontribusi bagi pemahaman kepada orang percaya untuk menghindari dan melawan dengan bijak setiap orang yang menggunakan politik identitas.

PEMBAHASAN

Hakikat dan Fenomenologi Politik Identitas

Politik identitas yang dilakukan dalam setiap jenjang pemilu secara umum dikaitkan dengan segala aktualisasi dari politikus dalam gerakan sosial mengatasnamakan kepentingan, baik yang dilakukan secara personal maupun komunal untuk mendapat suara dalam pemilu dan juga mengarah pada *personal branding* yaitu pengakuan yang lebih luas dari masyarakat luas sebagai bagian dari penguasaan wilayah. Memang banyak peran para politikus dalam melancarkan aksinya demi suara. Terlebih adanya sikap dan nilai politik yang mengatasnamakan identitas ini gayung bersambut dengan kelompok sosial yang memiliki pengalaman yang tidak enak akibat merasa diintimidasi baik ide, pendapat maupun tujuan sampai didiskriminasi oleh negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang tidak suka dengan aktivitas dari sebuah gerakan yang juga mengatasnamakan SARA. Politik identitas merupakan usaha para oknum manusia serakah dengan memanfaatkan manusia dan sumber dayanya secara politis yang mengutamakan kepentingan pribadi maupun kepentingan komunal yang didasarkan pada adanya persamaan identitas yang melekat mencakup ras, etnis, dan gender, maupun agama seta melibatkan kelompok persamaan tertentu. Sehingga politik ini kerap digunakan untuk membawa perubahan,¹³ namun beresiko terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan juga bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

¹³ Zahrotunnimah, "Pola Operasionalisasi Politik Identitas Di Indonesia."

Pemaknaan makna dan tujuan dari politik identitas sebagai kendaraan dan sarana berpolitik praktis sebagai tujuan pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian muncul mengemuka dalam praktek politik di kehidupan sehari-hari yang saat ini sering diberitakan dan dilihat dari oknum-oknum yang mengatasnamakan SARA.¹⁴ Oleh sebab itu pemaknaan dan sifat dari politik identitas seperti yang dinyatakan oleh Agnes Heller dalam kutipan Muhtar Haboddin, yang mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang diaktualisasikan dalam masyarakat umum yang fokus perhatiannya adalah perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat sebagai suatu kategori politik yang utama. Hal itu diutamakan dengan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal sampai pada kekerasan fisik dan juga pertentangan etika dan moral dalam kehidupan.¹⁵ Lebih jauh dalam bukunya Politik Identitas, Rozi dkk menguraikan problematika dan paradigma keetnisan akan menjadi bumerang bagi persatuan. Begitu juga dengan Donald L Morowitz dalam tulisan Muhtar Haboddin mengungkapkan bahwa politik identitas adalah memberikan garis yang tegas bagi keberagaman populasi dimana ketegasan itu untuk menentukan siapa yang akan disertakan sebagai gerbong dan kendaraan menuju kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak permanen yang didasari dari keberagaman dan keunikan manusia, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.¹⁶

Peran kepentingan manusia dalam mendapatkan kekuasaan memang

¹⁴ Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal."

¹⁵ Syafuan Rozi et al., *Politik Identitas* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 1.

¹⁶ Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal."

dilakukan berbagai cara supaya kepentingan personal maupun komunal dapat tercapai. Seperti yang terjadi beberapa pemilu, politik identitas menjadi cara untuk memuncaki kekuasaan. Bahkan sikap dari identitas ini digunakan sebagai provokator adu domba dalam masyarakat. Untuk itu sejatinya orang percaya dan gereja hadir dan bergumul dengan tantangan-tantangannya yang semakin komplek dalam membedakan manusia dengan ciri khas *like* dan *dislike*. Yang mana saat ini gereja berada di tengah situasi menguatnya secara besar-besaran politik identitas yang dimunculkan demi kekuasaan, dimana mengorbankan kepercayaan kepada Tuhan sebagai sarana dan alat pencapaian kekuasaan untuk menguasai sesama anak bangsa. Gereja juga berhadapan dengan para politikus yang memiliki sikap dan nilai moral yang rendah dan juga lemahnya integritas, kredibilitas serta identitas, dari para pemimpin atau tokoh agama yang mau diperalat untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun golongannya serta diperalat demi keinginan untuk berkuasa.

Sejauh ini diyakini bahwa adanya politisasi identitas yang mengatasnamakan SARA tidak pernah dapat menyelesaikan masalah, justru memperburuk kondisi kemajemukan bangsa serta nilai toleransi yang sudah dibangun menjadi runtuh akibat syawat politik yang berdasarkan kekuasaan dan keserakahan semata. Dampak besar juga terjadi mempengaruhi sistem pemerintahan dan keamanan bangsa, sebab hal itu mencederai demokrasi bangsa, dan merugikan bangsa.¹⁷ Oleh karena itu penguatan politik yang berdasarkan identitas yang merugikan keadilan manusia merupakan potret diri dari pergulatan politikus yang sengaja bernaluri rakus dari sebuah potret

manusia yang tidak bisa membawa keadilan sosial tanpa deskriminasi SARA.

Nilai dan Moral Ajaran Yesus sebagai sikap kerukunan dalam kemajemukan

Kemajemukan serta sikap dari toleransi di negara Indonesia dibangun oleh para pendiri bangsa di atas sikap persatuan. Dimana adanya perbedaan SARA justru menjadi kekuatan bagi negara karena melaluinya kekurangan yang ada menjadi saling terlengkapi. Perbedaan sejatinya memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk dapat belajar banyak perkara dan sikap baik antara lain: kerendahan hati, menghargai dan memahami pandangan orang lain, ketulusan dalam mengasihi dan sikap baik lain yang dapat terbangun dengan penuh damai dan kasih. Kemajemukan dan toleransi saling menghargai adalah sebagai berkah ketika bangsa ini dapat mengelolanya dengan baik.¹⁸ Terlebih nilai tersebut dapat menjadi tujuan bermasyarakat dalam mengaktualisasi sebagai gaya hidup dalam kerukunan.

Di dalam Perjanjian Baru, sikap hidup dalam kerukunan telah Yesus ajarkan dan teladankan secara nyata dalam kehidupan pengikut-Nya. Secara jelas juga di dalam Injil Matius tentang pernyataan Yesus terhadap jebakan kaum Farisi berkaitan dengan membayar pajak. Kaum Farisi merupakan kaum pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang padamas Bait Allah ke-2, sekitar abad ke 2 SM. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim yang diungkapkan Manafe dengan mengutip karya George Foot More adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Kelompok Hasidim

¹⁷ Kurnia Sondang Lumban Gaol, "Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama Di Indonesia," *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 35–51, <https://doi.org/10.52157/me.v5i1.57>.

¹⁸ Abd Mu'id Aris Shofa, "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila," *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1, no. 1 (2016): 34–40.

memisahkandiri dari orang biasa.¹⁹ Mereka sangat bertentangan dengan pemerintahan romawi dan menginginkan pernyataan Yesus yang menolak atau mendukung menjadi bumerang bagi Yesus terhadap masyarakat Israel yang marah kepada pemerintahan Romawi dengan adanya pajak yang besar. Dan juga menjadi pesakitan bagi Yesus bila melarang membayar pajak terhadap kaisar (Mat. 22: 15-22). Pertanyaan yang menjebak ingin melibatkan politik Identitas dari masyarakat Yahudi untuk menentang Yesus menjadi alasan orang farisi ini.

Di dalam Injil Yohanes adanya pertemuan Yesus dengan wanita Samaria yang memiliki banyak suami di sumur Yakub menjadi bukti bahwa kehendak Yesus untuk berkomunikasi membangun nilai moderat dan toleransi yang tidak menghakimi kepercayaan wanita Samaria yang menyembah di gunung Gerizim. Sejatinnya percakapan itu mencerminkan kedewasaan wanita Samaria untuk terbuka akan kehidupannya. Terlebih dalam komunikasi yang mengarah kepada prinsip penyembahan yang benar tersebut tidak ada kesan menyalahkan dan mengintimidasi namun mengandung ajakan yang penuh kasih yang tulus akan jiwa yang perlu diselamatkan. Bahkan ajakan yang dinyatakan Yesus mengandung kuasa sehingga dapat menggerakkan jiwa wanita tersebut untuk menyembah Allah dengan benar (Yoh. 4:4-26) Peran Yesus terhadap kasih-Nya kepada orang Samaria membuktikan Allah tidak membedakan manusia. Wujud kasih Allah ini juga harusnya menjadi dasar orang percaya untuk meneladani sikap-Nya mengharagai keberagaman dan pluralitas.

Kisah lain yang juga dipertegas rasa kemanusiaan dinyatakan Yesus

dalam pengajarannya adalah cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang sangat baik dan berhati mulia (Luk. 10:25-37). Dimana tokoh cerita tersebut berlatar belakang kebencian orang Yahudi kepada orang Samaria. Kebencian terhadap perkawinan silang dan tempat penyembahan yang berbeda dari orang Yahudi yaitu gunung gerizim. Sebab Samaria telah membangun kepercayaan yang dianggap sebagai pengejawantahan kebenaran sejati melalui peribadatan di Gunung Gerizim. Adanya perbedaan regligi dan percampuran suku menjadikan Konflik bernarasi kebencian ini tidak pernah selesai dan turun secara generasional, sehingga membawa narasi kebencian diantara kedua komunitas bangsa itu berasal dari sejarah yang panjang.²⁰ Namun dalam kisah tersebut menjabarkan kasih dan ketegasan Tuhan bahwa sesama manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dihormati tanpa melihat latar belakang sejarah. Sebab semua orang tanpa ada pembatasan baik dari warna kulit, ras, suku, kelompok atau batasan lainnya. Kisah pengajaran tentang toleransi dan kasih tersebut menambah nilai kebaikan bahwa sikap dan teladan yesus dalam menuangkan pengajaran tentang mengasih tidak membedakan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh politus saat ini. Dimana stereotip yang melahirkan kecurigaan yang besar dan prasangka intervensi melahirkan sikap diskriminasi maupun menuju intoleransi harus diluruhkan melalui kebaikan, kasih serta perilaku kepedulian yang dikerjakan tanpa mengenal SARA maka hal itu memberikan nilai pada kemanusiaan yang tidak melihat identitas sehingga membawa manusia pada kebaikan dan kepedulian yang

¹⁹ F S Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. April (2017): 1–16, <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/66>.

²⁰ Yonatan Arifianto, "Deskripsi Sejarah Konflik Horizontal Orang Yahudi Dan Samaria," *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 1 (2020): 33–39, <https://doi.org/10.46494/psc.v16i1.73>.

Pernyataan sikap hidup dalam nilai toleransi juga dinyatakan ajaran Yesus dalam kitab injil Yohanes 10:16 dimana Yesus mengajarkan dalam perumpamaan gembala yang baik yang mana gembala yang baik diilustrasikan sedang menuntun domba lain yang berasal dari kandang yang berbeda yang tidak masuk dalam kawanan. Namun domba-domba yang berasal dari kandang berbeda, semua pada akhirnya akan hidup bersatu dan berbaur dalam kedamaian serta kesejahteraan bersama gembala dipercaya dengan kriteria gembala yang baik tersebut. Perumpamaan dalam pengajaran Yesus tersebut menggambarkan bahwa Tuhan tidak mengadakan suatu pembeda, baik secara SARA, namun Yesus merangkul dengan kasih domba dari ‘kandang yang lain.’²² Perumpamaan domba yang berasal dari luar kandang tersebut mengisyaratkan bahwa di luar bangsa umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Yahudi pun adalah manusia yang diciptakan Allah yang membutuhkan tuntunan dan kasih Tuhan serta membutuhkan anugerah untuk beroleh kehidupan kekal. Hal ini membuktikan bahwa pengajaran tersebut menyatakan tidak adanya sikap dan perilaku eksklusivitas kelompok. Melalui perumpamaan tersebut Tuhan mengajarkan bahwa dalam pandanganNya, semua manusia sama berharga dan dikasihi-Nya tanpa kecuali.²³

²¹ Yonatan Alex Arifianto and Carolina Etnasari Anjaya, “Menggereja Yang Ramah Dalam Ruang Virtual: Aktualisasi Iman Kristen Merawat Keragaman,” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 4, no. 2 (2022): 219–30, <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v4i2.90>.

²² Adhika Tri Subowo, “Gembala Bagi Semua Domba: Memaknai Domba Dari Kandang Yang Lain Dalam Yohanes 10:16 Dalam Upaya Merangkul ‘Sang Liyan,’” *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 1, no. 2 (2021): 165, <https://doi.org/10.21460/aradha.2021.12.651>.

²³ Ronald Yohanes Sinlae, “Kompetensi Pedagogik Tuhan Yesus Dalam Injil Matius Pasal 5-7,” *Excelsis Deo: Jurnal Teologi,*

Perlu disadari bahwa sebagai pribadi manusia yang memiliki naluri mengasihi sesamanya pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan akan kerjasama dan perhatian dari sesamanya. Realita sikap toleransi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat membutuhkan nilai-nilai keluarga dan kebersamaan yang terikat nilai toleransi diantara sesama anak bangsa demi hadirnya kehidupan yang sejahtera aman dan harmonis. Sebab sejatinya kemajemukan dan sikap toleransi merupakan fakta keragaman bangsa Indonesia yang harus diterima dan disyukuri sebagai bagian dari kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia. dimana pluralitas dan keberagaman keyakinan tidak perlu diperdebatkan dan dieksploitasi demi kepentingan kekuasaan yang mengorbankan keadilan dan rasa kemanusiaan. Terlebih digunakan sebagai sarana menggugat kelompok-kelompok tertentu atau bahkan disingkirkan demi supremasi dan kepentingan politik dan agama tertentu untuk berkuasa dalam intimidasi dan persekusi kelompok atau agama minoritas.²⁴ Oleh karena itu pengajaran Yesus yang juga jauh sebelumnya dinyatakan dalam kitab Mazmur 133 dinyatakan bahwa kerukunan juga membawa kesatuan dan berkat yang dicurahkan bagi semua manusia yang menghargai persaudaraan yang diaktualisasikan setiap hari dengan menghargai harkat, martabat dan juga derajat manusia tanpa deskriminasi SARA. Dasar inilah menjadi acuan bahwa adanya ancaman terhadap politik identitas seharusnya tidak membawa orang percaya untuk bersikap apatis maupun marah dan membenci orang-orang yang berbeda secara SARA.

Misiologi, Dan Pendidikan 4, no. 1 (2019): 35–55.

²⁴ Dewi Magdalena Rotua, “Toleransi Agama Dan Motif Misi Kristen,” *Missio Ecclesiae* 3, no. 2 (2014): 145–61.

Tanggung Jawab dan Aktualisasi Kerukunan Sebagai Sikap dan Tindakan Orang Percaya

Keberadaan orang percaya yang memiliki agama dan identitas diri yang sejatinya menjunjung tinggi kerukunan dan pluralitas. Sebagai pribadi yang bergerak untuk kemajuan dan peradaban bangsa tidak bisa dipungkiri menghadapi pilihan-pilihan yang menentukan kemajuan bangsa tersebut atau juga menjadi bagian dari reduksi keberagaman. Pilihan tersebut dapat dinyatakan sebagai sikap dan tindakan berdampak atau tidak berdampak. Hal ini memiliki arti bahwa manusia beragama akan selalu menghadapi pengambilan keputusan untuk berpartisipasi secara aktif dan menjadi bagian dari kemajuan atau bersikap pasif terhadap keadaan yang hari lepas hari adanya rongrongan terhadap kesatuan bangsa melalui politik identitas di dalam negara tersebut. Sebab sejatinya kondisi ini muncul karena agama berada di dalam sebuah ruang lingkup yang lebih luas dari dirinya sendiri, yakni ruang publik.²⁵ Keikutsertaan orang percaya untuk berada dalam bagian kerukunan dapat meninggalkan cara berpolitik yang salah dengan politik identitas, karena hal itu berpotensi menimbulkan masalah yang sampai kepada akar rumput dalam kehidupan di masyarakat ketika umat beragama hidup bersama dengan umat beragama lain di ruang publik.²⁶ Oleh karena itu tanggung jawab tersebut diaktualisasikan sebagai warga negara Indonesia yang meyakini sistem ideologi dan landasan bernegara yaitu

Pancasila sebagai nilai yang kuat dan tak tergantikan oleh ideologi manapun dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang multikultural seperti bangsa Indonesia ini.²⁷ Maka itu Pancasila mau tidak mau harus dijadikan ketetapan pilihan yang tepat yang diaktualisasikan dan diimplikasikan disetiap *market place* dimana orang percaya tinggal dan berada sebagai bagian dari pluralisme dan panggilan Tuhan untuk menjadi saksi.

Sebagai pengikut Kristus haruslah memiliki sikap dan tindakan yang mendukung dan ikut berkontribusi dalam menjaga kedamaian. Tidak terlibat disetiap kegiatan yang mencoreng identitas manusia. Terlebih orang percaya juga diharapkan harus proaktif dan mendukung penuh bangsa dan negara dalam mengupayakan kerukunan supaya terjadinya toleransi beragama dan di negeri tercinta ini untuk generasi yang lebih baik. Melihat dampak masif dari politik identitas maka orang percaya berupaya dan kerja keras sangat dibutuhkan mengingat ancaman disintegrasi bangsa. Memang pluralitas agama disatu pihak sangat berharga dan merupakan kekayaan dan keunikan dari bangsa Indonesia yang besar, hal itu tidak dapat dipungkiri. Maka harus disikapi dengan bijak dan keputusan politik yang jauh dari SARA, agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan aman dan damai di negeri yang tercinta ini. Hendaknya toleransi dan keinginan kuat dalam masyarakat majemuk tidak sekedar menjadi suatu wacana dan retorika saja tetapi harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimarket place.²⁸ Maka peran gereja dapat memberikan edukasi dalam tanggung jawabnya memajukan bangsa dan juga menjaga dari perpecahan dari politik identitas dengan memperat kasih

²⁵ Grets Janialdi Apner Siregar, "Kehadiran Kristiani Dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan Dalam Ruang Publik Politis Di Indonesia," *Diegesis : Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.46933/dgs.vol6i21-24>.

²⁶ Paulus Sugeng Widjaja, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky, "Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 95–102, <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>.

²⁷ Atmari Atmari, "Jalan Keluar Dari Politik Identitas; Studi Antropologi Struktural," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 3, 2019, 333–42.

²⁸ Rotua, "Toleransi Agama Dan Motif Misi Kristen."

kepada sesama walaupun itu berbeda dalam SARA. Untuk itu sikap menghargai dan menghormati yang diteladankan Yesus diaktualisasikan dalam iman Kristen.

Sasaran dari edukasi warga gereja sebagai orang percaya adalah untuk mentransformasi kesadaran sebagai pribadi yang meneladani Kristus dan sebagai bagian umat dan masyarakat memiliki pikiran yang menghargai sesama bertujuan untuk menjadi lebih demokratis dan manusiawi dalam berpolitik praktis tanpa adanya sikap deskriminasi maupun intimidasi identitas. Sehingga Gereja bukan anti pluralistik dan kemajemukan di segala bidang juga gereja tau orang percaya mendukung kebebasan warganya untuk berpolitik tanpa menggunakan sarana politik identitas. Sebab kerukunan adalah harga dari sebuah perdamaian yang terus diperjuangkan untuk membawa keadilan yang berdampak dari damai sejahtera kepada manusia. Kerukunan juga senjata yang dinyatakan untuk mencounter keinginan manusia yang menunggangi SARA demi kekuasaan dan keserakahan duniawi.

KESIMPULAN

Pembahasan yang dikaji bagaimana posisi orang percaya terhadap ancaman politik identitas dan hilangnya toleransi memang diyakini bahwa pergumulan dan sikap gereja dengan dirinya sendiri yang selalu berada dalam bayang-bayang politisasi. Gereja harus bersikap tegas untuk membawa pesan damai. Sebab sejatinya orang percaya ataupun gereja pada umumnya dalam upaya menghadirkan keadilan sosial dan perdamaian serta kemajuan bangsa harus disertai sikap yang meneladani apa yang Yesus telah lakukan bagi dunia. Karena memperkokoh kerukunan ini menunjukkan jati diri sebagai terang dan garam dunia harus dituntut berdampak untuk ambil bagian sebagai warga negara yang bebas dari politik identitas. Untuk itu tanggung jawab yang berada

dalam fenomenologi politik identitas orang percaya dapat menciptakan kerukunan dan memperkokohnya melalui sikap yang menjadi berkat dalam ruang publik. Hal itu juga selaras dengan apa yang dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pejuang kemerdekaan yang tidak melihat latar belakang SARA. Begitu juga kemajemukan harus tetap dijaga dan dikawal dengan tindakan-tindakan setiap hari yang tidak pernah menyinggung sentimen berlebihan dari identitas manusia. Oleh karena itu saling menghargai dan menghormati menjadi cara tersendiri untuk memperkokoh kerukunan supaya bangsa besar atas nama Indonesia ini memberi rasa nyaman bagi generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assyari. "Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif." *An-Nida'* 41, no. 2 (2017): 202–12.
- Arifianto, Yonatan. "Deskripsi Sejarah Konflik Horizontal Orang Yahudi Dan Samaria." *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 1 (2020): 33–39. <https://doi.org/10.46494/psc.v16i1.73>.
- Arifianto, Yonatan Alex, and Carolina Etnasari Anjaya. "Menggereja Yang Ramah Dalam Ruang Virtual: Aktualisasi Iman Kristen Merawat Keragaman." *Jurnal Teologi Gracia Deo* 4, no. 2 (2022): 219–30. <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v4i2.90>.
- Atmari, Atmari. "Jalan Keluar Dari Politik Identitas; Studi Antropologi Struktural." In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3:333–42, 2019.
- Dhani, Fitria Wulan. "Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada."

- Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 1 (2019): 143–50.
<https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>.
- Haboddin, Muhtar. “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal.” *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (2012): 109–26.
<https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>.
- Lestari, Dina. “Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas Di Indonesia.” *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16.
<https://doi.org/10.36312/jupe.v4i4.677>.
- Lumban Gaol, Kurnia Sondang. “Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama Di Indonesia.” *Missio Ecclesiae* 5, no. 1 (2016): 35–51.
<https://doi.org/10.52157/me.v5i1.57>.
- Manafe, F S. “Sikap Kristen Dalam Arena Politik.” *Missio Ecclesiae* 6, no. April (2017): 1–16.
<https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/66>.
- Nego, Obet. “Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia.” *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 2 (November 5, 2020): 121–39.
<https://doi.org/10.46494/psc.v16i2.109>.
- Romadhon, Sukron, and Try Subakti. “Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia.” *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 91–115.
- Rotua, Dewi Magdalena. “Toleransi Agama Dan Motif Misi Kristen.” *Missio Ecclesiae* 3, no. 2 (2014): 145–61.
- Rozi, Syafuan, Firman Noor, Irine Hiraswari Gayatri, Mochtar Pabottingi, and Muridan S Widjojo. *Politik Identitas*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Sari, Endang. “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta.” *Kritis* 2, no. 2 (2016): 145–56.
- Shofa, Abd Mu’id Aris. “Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila.” *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1, no. 1 (2016): 34–40.
- Sinlae, Ronald Yohanes. “Kompetensi Pedagogik Tuhan Yesus Dalam Injil Matius Pasal 5-7.” *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2019): 35–55.
- Siregar, Grets Janialdi Apner. “Kehadiran Kristiani Dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan Dalam Ruang Publik Politis Di Indonesia.” *Diegesis : Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2021): 1–24.
<https://doi.org/10.46933/dgs.vol6i2.1-24>.
- Subowo, Adhika Tri. “Gembala Bagi Semua Domba: Memaknai Domba Dari Kandang Yang Lain Dalam Yohanes 10:16 Dalam Upaya Merangkul ‘Sang Liyan.’” *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 1, no. 2 (2021): 165.
<https://doi.org/10.21460/aradha.2021.12.651>.
- Suseno, Franz Magnis. “Politik Identitas? Renungan Tentang Makna Kebangsaan.” *Maarif* 13, no. 2 (2018): 7–13.
<https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.18>.
- Widjaja, Paulus Sugeng, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky. “Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 95–102.

Manna Rafflesia, 9/2 (April 2023)
<https://s.id/Man Raf>
<https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>.

P-ISSN: 2356-4547
E-ISSN: 2721-0006

Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. “Pola Operasionalisasi Politik Identitas Di Indonesia.” *Adalah* 2, no. 11 (2018): 1–13.

<https://doi.org/10.15408/adalah.v2i11.9438>.

Zaluchu, Sonny Eli. “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38.

<https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>.